

Penambang Kecil Berpotensi Tertekan

JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara. Regulasi anyar yang diteken pada 8 Agustus ini sekaligus mencabut aturan lama mengenai harga patokan mineral (HPM) yang sebelumnya menjadi dasar transaksi penjualan. Beleid baru ini menegaskan, HPM difungsikan terutama sebagai instrumen pengenaan pajak, royalti dan PNBP, bukan lagi acuan harga jual beli. Artinya, harga pasar dikembalikan ke mekanisme *supply-demand* dan hasil negosiasi antara penambang dan pembeli, khususnya smelter.

Namun perubahan ini memantik perdebatan. Di satu sisi pemerintah menilai langkah ini memperkuat penerimaan negara, sementara di sisi lain penambang khawatir posisi tawarnya makin lemah. Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menilai, pemerintah ingin mengoptimalkan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam, terutama mencegah praktik *undervaluation* dan *transfer pricing* yang bisa menggerus penerimaan negara. "Aturan ini lebih bersifat penegasan terhadap mekanisme yang sudah berlaku. Potensi tekanan tambahan bisa muncul ketika harga global melemah, karena HPM bisa lebih tinggi dibanding harga aktual," jelas Arif, Senin (1/9).

Namun dia melihat ada sisi positif, yakni aturan ini memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang terikat kontrak jangka panjang dengan harga di bawah HPM. Arif juga bilang, posisi smelter tidak serta-merta lebih kuat, sebab dalam praktik transaksi masih ada biaya tambahan berupa premi yang biasanya membuat harga jual beli bijih nikel lebih tinggi dari HPM.

Sementara itu, Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Djoko Widajatno menilai

beban penambang akan meningkat. Meski harga jual bisa di bawah HPM, perhitungan royalti dan PNBP tetap mengacu HPM.

"Negara relatif aman karena PNBP tetap berbasis HPM, sementara smelter diuntungkan dengan bahan baku lebih murah. Dampaknya, pasar mineral jadi lebih kompetitif, tapi risiko dumping muncul, keberlangsungan tambang kecil terancam, dan bisa terjadi konsolidasi ke pemain besar," kata dia.

Diki Mardiansyah

